Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan: Peran Moderasi Realisasi Anggaran

Charel Yosef Abi[1]*, Susmita Dian Indiraswari[2], Doni Wirshandono Yogivaria[3]

AFILIASI:
[1,2,3]Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

***KORESPONDENSI:**
charelabi8@gmail.com

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN:
https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK

DOI: 10.32534/jpk.v13i1.8529

CITATION:
Abi, C. Y., Indiraswari, S. D., & Yogivaria, D. W. (2026). Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan: Peran Moderasi Realisasi Anggaran. Jurnal Proaksi, 13(1), 238-258.

Riwayat Artikel :
Artikel Masuk:
3 Maret 2026

Di Review:
25 Maret 2026

Diterima:
31 Maret 2026

Abstrak

Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia dengan menguji peran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai variabel moderasi.

Metode – Pendekatan kuantitatif dengan *explanatory research* pada 34 provinsi periode 2022–2024 sebagai sampel jenuh. Data bersumber dari LKPD, BPS, dan DJPK, dianalisis dengan regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) melalui SPSS versi 26.

Temuan Utama - PAD memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Belanja Modal tidak terbukti memberikan pengaruh yang berarti signifikan. LRA memoderasi dan memperkuat pengaruh negatif PAD ketika realisasi anggaran tinggi, mencerminkan lemahnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Temuan memperkuat teori sinyal bahwa makna sinyal fiskal ditentukan oleh kualitas tata kelola. Pemerintah daerah perlu menggeser fokus dari peningkatan PAD menuju penguatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi belanja modal.

Kebaruan Penelitian - Penelitian ini menguji fungsi LRA sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara PAD dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi menggunakan data periode terkini.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Teori Sinyal

Abstract

***Main Purpose** - This study aims to examine the effect of Regional Own-Source Revenue (PAD) and Capital Expenditure on the Financial Performance of Provincial Local Governments in Indonesia by testing the role of the Budget Realization Report (LRA) as a moderating variable.*

***Method** - A quantitative approach using explanatory research in 34 provinces for the 2022–2024 period served as a saturated sample. Data sourced from the Regional Government Accountability Report (LKPD), BPS, and DJPK were analyzed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS version 26.*

***Main Findings** - PAD has a significant negative effect on financial performance, while Capital Expenditure shows no significant effect. LRA moderates and strengthens the negative effect of PAD when budget realization is high, reflecting weak quality in regional budget planning and execution.*

***Theory and Practical Implications** - Findings reinforce signaling theory, indicating that the meaning of fiscal signals is determined by governance quality. Local governments should shift focus from merely increasing PAD toward strengthening planning, control, and evaluation of capital expenditure.*

***Novelty** - This study empirically tests the role of LRA as a moderating variable in the relationship between PAD and Capital Expenditure on provincial-level financial performance using the latest period data.*

Keywords: Regional Original Income, Capital Expenditure, Regional Government Financial Performance, Budget Realization Report, Signal Theory

PENDAHULUAN

Di Indonesia, otonomi daerah diimplementasikan sebagai bagian dari reformasi sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemandirian pemerintahan daerah dalam pengelolaan sumber daya dan penyampaian pelayanan masyarakat (Mubarok et al., 2022; M. Putri & Aswar, 2022). Sektor publik Indonesia telah menjadi salah satu yang paling terdesentralisasi di dunia sejak pemerintahan Orde Baru yang berkepanjangan dimulai pada tahun 1998 dan program otonomi daerah dimulai pada tahun 2001. Hal ini terutama berlaku dalam hal transfer kewenangan pelayanan publik kepada pemerintah daerah (Lewis, 2023) . Kebijakan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah (Atmoko & Khairudin, 2022; Susanti et al., 2025). Pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui desentralisasi fiskal, meskipun masih terdapat kesenjangan dalam kemampuan fiskal dan kesiapan berbagai daerah untuk mengelola kewenangan masing-masing (Arsallya et al., 2021; Oktavianti et al., 2023; Sukma & Hendaris, 2021; Widodo, 2022).

Anggaran Daerah berfungsi sebagai alat utama untuk perencanaan dan alokasi keuangan pemerintah daerah, yang mencerminkan manajemen keuangan daerah (Safitri et al., 2023). APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai indikator kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Hutauruk, 2024). Untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan ekspansi ekonomi, pemerintah daerah harus mendistribusikan belanja modal secara efisien dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PPN). Investasi modal daerah telah terbukti memiliki hubungan positif dan substansial dengan pertumbuhan sektor riil, dan Undang-Undang Otonomi Daerah Indonesia, yang mulai berlaku pada tahun 2001, memberikan kewenangan anggaran yang lebih besar kepada pemerintah provinsi dan daerah. (Wiryawan & Otchia, 2022). Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya menghasilkan kinerja keuangan yang optimal (Firmansyah et al., 2024).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara teoritis seharusnya berbanding lurus dengan membaiknya kinerja keuangan pemerintah daerah, namun kenyataan empiris menunjukkan pola yang paradoksal. Beberapa provinsi dengan tingkat PAD yang tinggi justru mengalami defisit anggaran pada periode 2022–2025, seperti Provinsi Jambi, Bali, dan Jawa Tengah (Khusnizar, 2024; Purnomo, 2024; Winata, 2024). Kondisi ini diduga berkaitan dengan lemahnya kualitas belanja daerah, di mana proporsi belanja modal secara nasional masih rendah dari total belanja daerah (Simanjuntak, 2024), dan realisasinya di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur belum mencapai target APBD yang ditetapkan (Kemenkeu, 2025; Putri, 2025). Potensi fiskal yang besar tidak selalu dapat dikonversi menjadi kinerja keuangan yang optimal, karena masih ada indikasi bahwa banyak daerah dengan kapasitas keuangan yang buruk sangat bergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat untuk membayar pelaksanaan pemerintahan di wilayah mereka. (Maher et al., 2025).

Secara teoritis, kondisi tersebut bertentangan dengan perspektif teori sinyal yang menyatakan bahwa informasi keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, seperti PAD dan belanja modal, merupakan sinyal penting bagi pemangku kepentingan dalam menilai kualitas kinerja dan tata kelola keuangan (Yuliawati et al., 2024). PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal, sedangkan belanja modal menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Ukuran kinerja keuangan merupakan alat yang digunakan untuk menilai stewardship pemerintah daerah serta memberikan transparansi dan akuntabilitas, yang mencakup rasio-rasio yang menggambarkan tingkat desentralisasi, kemandirian, belanja langsung, dan pertumbuhan pendapatan asli daerah (Suryani & Rachman, 2026). Akan tetapi, temuan dari berbagai penelitian empiris mengungkapkan adanya ketidakkonsistenan, yakni PAD tidak senantiasa

memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan belanja modal pun kerap kali tidak terbukti berpengaruh secara signifikan (Andriani, 2023; Dewi et al., 2022; Putri & Yuniarta, 2023; Zahrah et al., 2024).

Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang mencakup aspek empiris, teoritis, dan kontekstual. Secara empiris, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan antara PAD, belanja modal, dan kinerja keuangan. Dari sisi teoritis, sebagian besar penelitian masih berfokus pada hubungan langsung tanpa mempertimbangkan mekanisme yang dapat menjelaskan bagaimana kualitas pengelolaan anggaran memengaruhi hubungan tersebut. Secara regulatif, UU No. 1 Tahun 2022 memang membawa pembaruan teknis dalam tata kelola fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Akan tetapi, undang-undang ini belum menyentuh akar permasalahan desentralisasi yang lebih dalam, seperti korupsi dan praktik klientelisme, sehingga efektivitasnya dalam mendorong efisiensi belanja daerah dan perbaikan layanan publik masih diragukan (Lekettey et al., 2025). Sementara itu, secara kontekstual, penelitian sebelumnya masih terbatas pada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan satu provinsi saja serta belum mencerminkan dinamika terbaru periode 2022–2024.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan variabel penting dalam konteks ini untuk menjelaskan hubungan antara belanja modal, pendapatan daerah (PAD), dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Besaran realisasi pendapatan dan pengeluaran, bersama dengan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, semuanya tercermin dalam LRA (Permatasari dkk., 2025; Rahmadani dkk., 2025). Menurut teori sinyal, LRA merupakan indikator visibilitas dan transparansi yang dapat meningkatkan atau mengurangi dampak variabel fiskal terhadap kinerja keuangan (Khoiriyyah & Alliyah, 2025).

Deskripsi ini menjadi dasar analisis penelitian tentang dampak belanja modal dan Pendapatan Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia, serta fungsi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai variabel moderasi dalam hubungan ini. Diharapkan studi ini akan memberikan kontribusi teoritis terhadap teori sinyal pembangunan sektor publik serta kontribusi empiris berupa data tentang manajemen keuangan daerah untuk tahun 2022–2024. Selain itu, diharapkan temuan studi ini akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi manajemen keuangan daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Sinyal (*Signalling Theory)*

Teori Sinyal dikemukakan oleh Spence (1973) memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana asimetri informasi dikelola ketika berbagai pihak memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda (Herzallah et al., 2025). Pada dasarnya menjelaskan mekanisme penyampaian informasi dalam kondisi asimetri informasi, dimana pihak yang memiliki informasi lebih lengkap berinisiatif untuk menyampaikan sinyal tertentu kepada pihak yang kekurangan informasi (Mulyadi & Kiswara, 2025).

Dalam konteks pemerintahan, teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah menyampaikan informasi kinerja dan kondisi daerah agar masyarakat dapat menilai dan merespons kebijakan (Yuliana et al., 2022). Teori ini mendorong pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang jelas dan transparan. Laporan berkualitas, didukung sistem internal dan pengungkapan memadai, menjadi sinyal positif yang meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendukung kelancaran kinerja keuangan dan pemerintahan daerah (Anynda & Hermanto, 2020).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006, kinerja adalah hasil aktivitas yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan penggunaan dana. Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan pencapaian pengelolaan keuangan, meliputi pendapatan dan belanja, yang dievaluasi sesuai sistem keuangan dalam kebijakan dan peraturan yang berlaku (Khairudin et al., 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merujuk pada ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai penerimaan yang bersumber dari potensi ekonomi wilayah daerah itu sendiri, yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah." (Ishak, 2022; Padang & Padang, 2023).

PAD berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah dituntut mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kemandirian dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan, dengan tetap menghindari kebijakan yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi atau menghambat mobilitas penduduk, barang, dan jasa antardaerah (Cahyani et al., 2025).

Belanja Modal

Sesuai ketentuan PP No. 71 Tahun 2010, "belanja modal merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran, seperti tanah, gedung, peralatan, dan aset tak berwujud. Di samping memperkuat kekayaan aset pemerintah, pengeluaran ini sekaligus membawa implikasi terhadap meningkatnya kebutuhan biaya perawatan dan pemeliharaan." (Arethusa & Terawati, 2025).

Besarnya alokasi belanja modal tidak menjamin keberhasilan program tanpa pengelolaan yang efisien dan tepat guna. Bagi daerah dengan keterbatasan keuangan, efisiensi menjadi kunci agar setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal melalui perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang cermat, dan evaluasi yang konsisten sehingga selaras dengan prioritas kebutuhan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Haryati et al., 2025).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Lembaga Keuangan Daerah kepada pemerintah pusat. Laporan ini menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan target anggaran yang telah ditetapkan serta capaian pada periode sebelumnya, sekaligus memuat analisis mendalam mengenai pendapatan dan pembiayaan daerah (Rahmadani et al., 2025).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang penting. Laporan ini digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta sebagai alat untuk menjaga stabilitas, mendistribusikan sumber daya publik, dan mengevaluasi kinerja organisasi melalui analisis realisasi belanja dan pembiayaan daerah (Saputra et al., 2020).

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kapabilitas pengelolaan fiskal secara efektif dan efisien. PAD menggambarkan kapasitas fiskal daerah, sementara belanja modal mencerminkan komitmen investasi pembangunan jangka panjang. Keduanya secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sebagaimana

dikonfirmasi oleh berbagai kajian terdahulu (Atmoko & Khairudin, 2022; Mubarok et al., 2022; Safitri et al., 2023). Temuan tersebut menegaskan bahwa sinergi antara kemampuan pendapatan dan efektivitas belanja menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.

(H1): PAD dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan daerah merupakan ukuran penting kemandirian fiskal yang menunjukkan seberapa baik suatu daerah dapat membiayai administrasi dan inisiatif ekonominya sendiri. Peningkatan pendapatan daerah (PAD) menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa kemampuan keuangan suatu daerah telah dioptimalkan. Dampak pendapatan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah telah ditunjukkan dalam sejumlah studi sebelumnya (Hutauruk, 2024; Padang & Padang, 2023; Zahrah et al., 2024). Namun demikian, ada studi yang juga menemukan hasil tidak konsisten, di mana peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan (Dewi et al., 2022).

(H2): Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan aset guna mendukung layanan publik dan ekspansi ekonomi tercermin dalam belanja modal. Diharapkan investasi jangka panjang ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah. Banyak penelitian telah menunjukkan bagaimana belanja modal memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah (Arsallya et al., 2021; Sartika et al., 2025). Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa investasi modal memiliki sedikit pengaruh karena keuntungannya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya di lapangan atau mungkin hanya terlihat dalam jangka waktu yang lama (Andriani, 2023; Fitriani & Syarif, 2025).

(H3): Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Peran Laporan Realisasi Anggaran sebagai moderasi pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas realisasi anggaran berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah di samping alokasi pendapatan dan pengeluaran. Tingkat pelaksanaan anggaran dan kelayakan manajemen keuangan daerah tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Data ini merupakan indikasi penting untuk mengevaluasi seberapa baik sumber daya publik digunakan. Menurut penelitian, kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh kualitas pelaporan keuangan dan tingkat realisasi anggaran (Firmansyah et al., 2024; Rahmadani et al., 2025; Saputra et al., 2020). Oleh karena itu, keberadaan LRA memperkuat model hubungan antara PAD, belanja modal, dan kinerja keuangan.

(H4): Pendapatan Asli Daerah (PAD)dan Belanja Modal yang dimoderasi oleh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Peran Laporan Realisasi Anggaran sebagai moderasi pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Optimalisasi pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh tingkat realisasi anggaran. PAD yang tinggi tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap kinerja keuangan apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mencerminkan sejauh mana pendapatan tersebut direalisasikan sesuai perencanaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa realisasi anggaran berperan dalam menentukan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah serta berdampak pada kinerja keuangan (Firmansyah et al., 2024; Rahmadani et al., 2025; Yuliana et al., 2022).

(H5): Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimoderasi oleh Laporan Realisasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Peran Laporan Realisasi Anggaran sebagai moderasi pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keberhasilan belanja modal tidak semata-mata bergantung pada besaran alokasi anggaran yang ditetapkan, melainkan juga ditentukan oleh tingkat realisasi dan ketepatan dalam pelaksanaannya. Realisasi anggaran yang optimal memungkinkan belanja modal menghasilkan manfaat ekonomi yang maksimal bagi daerah. Dalam konteks ini, LRA berperan sebagai indikator kunci dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi belanja tersebut. Sejumlah penelitian mengonfirmasi bahwa efektivitas belanja dan tingkat realisasi anggaran memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Haryati et al., 2025; Saputra et al., 2020).

(H6): Belanja Modal yang dimoderasi oleh Laporan Realisasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan pendapatan daerah (LRA) sebagai variabel moderasi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penjelasan untuk mengevaluasi hubungan kausal antar variabel, yaitu dampak PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Metode ini digunakan untuk mengukur seberapa baik ketiga faktor tersebut bekerja bersama untuk menjelaskan variasi dalam kinerja keuangan pemerintah daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari masing-masing situs web pemerintah provinsi, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan data Anggaran Daerah (APBD) dari Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DJPK) Kementerian Keuangan merupakan 34 sumber data kuantitatif sekunder yang digunakan dalam teknik pengambilan sampel jenuh.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran	Skala
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio aktivitas, rasio cakupan layanan utang (DSCR), dan rasio pertumbuhan keuangan daerah merupakan beberapa indikator utama yang dapat digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan daerah dengan anggaran daerah (Sari et al., 2021).	(Total Belanja / Total Pendapatan) × 100%	Rasio
Pendapatan Asli Daerah	Analisis pertumbuhan digunakan untuk menilai tren kenaikan atau penurunan kinerja antar periode. Rasio pertumbuhan mencerminkan besaran perubahan pendapatan yang terjadi dari satu periode akuntansi ke periode berikutnya, baik yang bersifat peningkatan maupun penurunan (Wulandari et al., 2023).	(PAD tahun sekarang – PAD tahun sebelum)/ PAD tahun sebelum × 100%	Rasio

Belanja Modal	Pengeluaran pemerintah dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi riil di bidang-bidang yang dikenal sebagai belanja modal. Dengan membandingkan belanja modal yang terealisasi dengan total pengeluaran regional yang terealisasi, seseorang dapat menentukan persentase belanja modal dalam anggaran regional (Marlianita & Saleh, 2020).	(Realisasi Belanja Modal / Total Anggaran Belanja Modal) × 100%	Rasio
Laporan Realisasi Anggaran	Efektivitas mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tanpa mempertimbangkan biaya yang digunakan (Utari et al., 2024).	(Realisasi Pendapatan / Anggaran Pendapatan) × 100%	Rasio

Sumber : (Marlianita & Saleh, 2020; Sari et al., 2021; Utari et al., 2024; Wulandari et al., 2023)

Untuk menyelidiki dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah serta peran moderasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian langkah yang terorganisir dan metodis. Sejumlah analisis digunakan, seperti:

Dengan menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan simpangan baku sebagai indikator kecenderungan sentral dan dispersi data, analisis statistik deskriptif memberikan cara terorganisir untuk mengkarakterisasi dan meringkas fitur utama dari setiap variabel penelitian.

Serangkaian uji statistik yang dikenal sebagai "pengujian asumsi klasik" digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa model regresi linier menggunakan teknik OLS memenuhi kondisi mendasar yang diperlukan agar hasil estimasi dapat diandalkan dan dipahami. Uji ini terdiri dari pengujian autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas.

Metode analisis regresi yang disebut analisis regresi termoderasi (MRA) digunakan untuk melihat dan mengevaluasi hubungan antara variabel independen dan dependen dengan mempertimbangkan variabel moderasi.

Model MRA:

Persamaan 1 : $Y= \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 BM + \varepsilon$

Persamaan 2 : $Y= \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 BM + \beta_3 LRA + \varepsilon$

Persamaan 3 : $Y = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 BM + \beta_3 LRA + \beta_4 (PAD \times LRA) + \beta_5 (BM \times LRA) + \varepsilon$

Keterangan:

- Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- α = Konstanta
- β = Koefisisen regresi
- X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X2 = Belanja Modal
- LRA = Laporan Realisasi Anggaran
- PAD × LRA = Pendapatan Asli Daerah × Laporan Realisasi Anggaran
- BM × LRA = Belanja Modal × Laporan Realisasi Anggaran
- ε = Error term

Tingkat kontribusi variabel independen terhadap penjelasan variasi variabel dependen diukur menggunakan uji koefisien determinasi (R2). Penelitian ini memungkinkan penentuan persentase pengaruh PAD, belanja modal, dan LRA secara bersamaan terhadap perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Uji F digunakan untuk menentukan apakah semua faktor independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen secara signifikan, atau dengan kata lain, untuk menentukan apakah PAD dan belanja modal memiliki dampak simultan terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, uji t digunakan dalam analisis regresi berganda untuk menentukan apakah setiap variabel independen memiliki dampak yang agak signifikan terhadap variabel dependen, khususnya untuk menguji dampak belanja modal dan PAD individu terhadap keberhasilan keuangan.

Karena SPSS Statistics versi 26 dapat menangani data kuantitatif secara metodis menggunakan analisis regresi dan uji moderasi, maka perangkat lunak ini digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan data anggaran daerah untuk setiap provinsi, pengolahan data dilakukan dengan memasukkan variabel PAD, belanja modal, dan LRA. Meskipun metode ini menggunakan data gabungan (pooled data) dan bukan data panel murni, hal ini memudahkan analisis korelasi antar variabel.

HASIL

Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan 102 sampel data yang diperoleh dari pemerintah daerah. Hasil statistik deskriptif menunjukkan gambaran sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	102	-.65	.47	.0835	.13601
Belanja Modal	102	.49	1.34	.8887	.10516
Kinerja Keuangan Pemda	102	.48	1.35	1.0107	.09069
Laporan Realisasi Anggaran	102	.75	1.35	.9878	.08053
Valid N (listwise)	102				

Sumber: SPSS, 2026

PAD menunjukkan kapasitas fiskal yang signifikan di berbagai wilayah, dengan rata-rata 0,0835, deviasi standar 0,136, dan kisaran -0,65 hingga 0,47. Rata-rata pengeluaran modal adalah 0,8887, dengan deviasi standar 0,105 dan kisaran 0,49–1,34, menunjukkan distribusi yang stabil dan homogen. Sementara itu, kinerja keuangan pemerintah provinsi rata-rata 1,0107 dengan deviasi standar terendah, menunjukkan kondisi yang stabil dan umumnya menguntungkan.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov guna menguji apakah residual model regresi mengikuti distribusi normal. Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) melebihi 0,05, maka residual dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	102
Asymp. Sig. (2-tailed)	.004[c]
Asymp. Sig. (2-tailed)	.047[c]
Asymp. Sig. (2-tailed)	.001[c]

Sumber: SPSS, 2026

Dengan nilai tanda tangan Asymp. sebesar 0,004 (Persamaan 1), 0,047 (Persamaan 2), dan 0,001 (Persamaan 3) semuanya di bawah 0,05, temuan uji normalitas menunjukkan bahwa persamaan ketiga melanggar asumsi normalitas, dan H0 ditolak. Namun, pelanggaran ini bukanlah masalah besar dengan ukuran sampel 102 observasi (n>30) karena estimasi parameter regresi masih dapat dianggap sangat valid menurut Teorema Batas Pusat.

Uji Multikolinearitas

Nilai Toleransi dan Faktor Inflasi Varians (VIF) dalam tabel Koefisien diperiksa untuk melakukan uji multikolinearitas. Tidak ada multikolinearitas jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

Tabel 4. Hasil Uji Multikoliearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.016	.007		152.787	.000		
	X1	-.243	.050	-.364	-4.855	.000	.885	1.130
	X2	.130	.067	.151	1.940	.055	.826	1.211
	Z	-.163	.103	-.144	-1.582	.117	.597	1.674
	X1Z	-2.169	.453	-.400	-4.783	.000	.713	1.403
	X2Z	.337	.487	.052	.691	.491	.872	1.146

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : SPSS, 2026

Hasil uji multikolinearitas mengindikasikan bahwa seluruh variabel bebas dalam model terbebas dari masalah multikolinearitas, yang ditunjukkan oleh nilai VIF di bawah 10 dan nilai Tolerance di atas 0,10. Secara rinci, PAD memiliki nilai VIF sebesar 1,130, Belanja Modal sebesar 1,211, dan LRA sebesar 1,674 sebagai nilai tertinggi namun masih jauh dari ambang batas yang ditetapkan. Adapun kedua variabel interaksi PAD×LRA dan BM×LRA juga menunjukkan nilai yang aman dengan VIF masing-masing sebesar 1,403 dan 1,146.

Uji Heteroskedastisitas

Pendekatan Glejser digunakan dalam penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan korelasi Spearman antara setiap variabel independen dan nilai absolut residual. Variabel yang dimaksud dianggap bebas dari gejala heteroskedastisitas jika nilai Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			PAD	Belanja Modal	LRA	PAD* LRA	Belanja Modal*LRA	Unstandardized Residual
Spearman's rho	PAD	Correlation Coefficient	1.000	-.106	.239*	.998**	.078	.220*
		Sig. (2-tailed)	.	.289	.015	.000	.433	.026
		N	102	102	102	102	102	102
	Belanja Modal	Correlation Coefficient	-.106	1.000	.204*	-.106	.768**	-.018
		Sig. (2-tailed)	.289	.	.040	.288	.000	.857
		N	102	102	102	102	102	102
	LRA	Correlation Coefficient	.239*	.204*	1.000	.277**	.727**	.012
		Sig. (2-tailed)	.015	.040	.	.005	.000	.905
		N	102	102	102	102	102	102
	PAD*LRA	Correlation Coefficient	.998**	-.106	.277**	1.000	.101	.215*
		Sig. (2-tailed)	.000	.288	.005	.	.314	.030
		N	102	102	102	102	102	102
	BM*LRA	Correlation Coefficient	.078	.768**	.727**	.101	1.000	-.041
		Sig. (2-tailed)	.433	.000	.000	.314	.	.683
		N	102	102	102	102	102	102
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.220*	-.018	.012	.215*	-.041	1.000
		Sig. (2-tailed)	.026	.857	.905	.030	.683	.
		N	102	102	102	102	102	102

Sumber : SPSS, 2026

Hasil uji menunjukkan pelanggaran asumsi homoskedastisitas pada ketiga persamaan. PAD secara konsisten menjadi sumber utama heteroskedastisitas (sig. 0,026), sementara belanja modal dan LRA tidak menunjukkan masalah. Kedua variabel interaksi PAD×LRA dan BM×LRA mengalami heteroskedastisitas yang sangat parah dengan signifikansi 0,000 dan koefisien korelasi yang sangat tinggi masing-masing sebesar 0,998 dan 0,768.

Uji Autokorelasi

Teknik Durbin-Watson (DW) digunakan dalam penelitian ini untuk menguji autokorelasi. Model dianggap bebas autokorelasi jika nilai DW berada di antara dU dan 4-dU. Di sisi lain, hasil pengujian dikatakan berada di zona tidak meyakinkan jika nilai DW berada di antara dL dan dU atau antara 4-dU dan 4-dL.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.540[a]	.292	.277	.07710	2.322
2	.633[a]	.400	.382	.07130	1.908
3	.722[a]	.521	.497	.06435	1.734

Sumber : SPSS, 2026

Dengan nilai DW sebesar 1,908, yang berada di zona aman, hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa Persamaan 2 tidak menunjukkan autokorelasi. Kemungkinan tidak ada masalah autokorelasi yang signifikan karena nilai DW Persamaan 1 sebesar 2,322 berada di zona meragukan tetapi di sekitar batas aman. Persamaan 3, di sisi lain, menunjukkan autokorelasi positif yang sedikit dan berada di zona meragukan dengan nilai DW sebesar 1,734.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis 1

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.242	2	.121	20.369	.000[b]
	Residual	.589	99	.006		
	Total	.831	101			

Sumber : SPSS, 2026

Uji F (simultan) pada Persamaan 1 digunakan untuk menguji Hipotesis 1. Secara signifikan kurang dari alfa 0,05, nilai F yang dihitung adalah 20,369 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa varians dalam kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh model regresi secara keseluruhan.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis 1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.540[a]	.292	.277	.07710

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

Sumber : SPSS, 2026

PAD dan belanja modal gabungan dapat menjelaskan 29,2% variasi kinerja keuangan, menurut nilai R Kuadrat sebesar 0,292; faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model menjelaskan 70,8% sisanya. Temuan ini mendukung H1, yang menunjukkan bahwa PAD dan belanja modal memiliki dampak substansial pada kinerja keuangan pemerintah daerah secara bersamaan.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis 2 & 3

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.940	.066		14.252	.000
	Pendapatan Asli Daerah	-.343	.057	-.515	-6.071	.000
	Belanja Modal	.112	.073	.130	1.529	.130

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : SPSS, 2026

Uji t pada Persamaan 1 digunakan untuk memeriksa H2 dan H3. Variabel PAD memiliki koefisien regresi -0,343, nilai t -6,071, dan tingkat signifikansi 0,000 dalam uji H2. PAD telah terbukti memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sebagaimana dibuktikan oleh nilai signifikansi yang jauh di bawah tingkat 0,05. Variabel yang memiliki kontribusi terbesar dalam model ini adalah PAD, menurut nilai beta -0,515. Berdasarkan hasil tersebut, **H2 diterima.**

Variabel Belanja Modal memiliki koefisien regresi sebesar 0,112, nilai t sebesar 1,529, dan tingkat signifikansi sebesar 0,130 dalam uji H3. Belanja modal dianggap tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena nilai signifikansi ini lebih besar dari batas 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, **H3 ditolak.**

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis 4

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.333	3	.111	21.808	.000[b]
	Residual	.498	98	.005		
	Total	.831	101			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal

Sumber : SPSS, 2026

Persamaan 2 dengan variabel moderasi LRA diuji hipotesis H4 menggunakan uji F. Dengan signifikansi 0,000 dan nilai F estimasi sebesar 21,80, model Persamaan 2 secara keseluruhan signifikan dan lebih efektif daripada Persamaan 1 dalam menjelaskan varians dalam Kinerja Keuangan. Model ini menjelaskan 40,0% variasi dalam Kinerja Keuangan, peningkatan sebesar 10,8 poin persentase dibandingkan Persamaan 1, menurut nilai R Kuadrat, yang meningkat menjadi 0,400.

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis 4

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.249	.095		13.106	.000
	Pendapatan Asli Daerah	-.272	.055	-.408	-4.945	.000
	Belanja Modal	.213	.072	.247	2.970	.004
	Laporan Realisasi Anggaran	-.410	.097	-.364	-4.217	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : SPSS, 2026

Pada tingkat individual, seluruh variabel dalam Persamaan 2 terbukti berpengaruh signifikan. PAD (X1) menunjukkan pengaruh negatif signifikan dengan koefisien sebesar -0,272 dan signifikansi 0,000. Belanja Modal (X2) berpengaruh positif signifikan dengan koefisien 0,213 dan signifikansi 0,004, di mana hasil ini berbeda dari Persamaan 1 dan mengindikasikan bahwa kehadiran variabel LRA mampu memperjelas kontribusi Belanja Modal terhadap model. Adapun LRA (Z) berpengaruh negatif signifikan dengan koefisien -0,410 dan signifikansi 0,000. Berdasarkan temuan tersebut, **H4 diterima**, yang membuktikan bahwa PAD dan Belanja Modal yang dimoderasi oleh LRA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis 5 & 6

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.198	.423		2.833	.006
	PAD*LRA	-2.169	.453	-3.395	-4.783	.000
	Belanja Modal*LRA	.337	.487	.524	.691	.491

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : SPSS, 2026

Hasil pengujian H5 mengungkapkan bahwa variabel interaksi PAD×LRA memiliki koefisien sebesar -2,169 dengan nilai t sebesar -4,783 dan signifikansi 0,000, yang membuktikan bahwa LRA secara signifikan memoderasi hubungan antara PAD dan Kinerja Keuangan. Koefisien interaksi yang bernilai negatif dan besar, didukung oleh nilai Beta sebesar -0,400, mengindikasikan efek moderasi yang sangat kuat, di mana semakin tinggi nilai LRA justru semakin mempertegas pengaruh negatif PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Berdasarkan temuan ini, **H5 dinyatakan diterima.**

Variabel interaksi BM×LRA memiliki koefisien 0,337 dengan nilai t sebesar 0,691 dan tingkat signifikansi 0,491, yang secara signifikan di atas ambang batas 0,05, menurut temuan uji H6. Hal ini menunjukkan bahwa dampak belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tidak bergantung pada tingkat realisasi anggaran yang dicapai karena LRA tidak terbukti secara signifikan mengubah hubungan antara belanja modal dan kinerja keuangan. Dengan mempertimbangkan hasil-hasil ini, **H6 dinyatakan ditolak.**

Uji Ketahanan (*Robustness Tests*)

Guna memastikan keandalan temuan, dilakukan uji ketahanan melalui dua pendekatan yaitu winsorization variabel PAD pada persentil 1% dan 99% (PAD_Wins) untuk mengendalikan pengaruh nilai ekstrem, serta Weighted Least Squares (WLS) sebagai koreksi atas heteroskedastisitas yang terdeteksi pada uji asumsi klasik. Hasil kedua pendekatan dibandingkan dengan model asli pada tabel berikut.

Persamaan 1

Model asli yang ditampilkan pada tabel 7 menghasilkan F = 20,369 (Sig. 0,000) dengan R Square 0,292 yang ditunjukkan pada tabel 8, di mana PAD berpengaruh negatif signifikan (B = -0,343, Sig. 0,000) dan BM tidak signifikan (Sig. 0,130) pada tabel 9.

Tabel 13. Hasil Uji Model Winsorized

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.225	2	.113	18.419	.000[b]
	Residual	.605	99	.006		
	Total	.831	101			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, PAD_Wins

Sumber : SPSS, 2026

Model Winsorized menghasilkan F = 18,419 (Sig. 0,000) dengan prediktor PAD_Wins dan BM. Nilai F yang sedikit lebih kecil namun tetap signifikan menunjukkan model secara simultan masih valid. Penurunan F dari 20,369 menjadi 18,419 bersifat wajar dan tidak substansial. Perbandingan ini menunjukkan bahwa **H1 tetap terdukung** secara robust karena model simultan PAD dan BM konsisten signifikan di kedua spesifikasi.

Tabel 14. Hasil Uji Winsorized

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.198	.423		2.833	.006
	Pendapatan Asli Daerah	1.899	.457	2.848	4.156	.000
	Belanja Modal	-.203	.491	-.235	-.413	.681
	Laporan Realisasi Anggaran	-.281	.428	-.249	-.656	.513
	PAD*LRA	-2.169	.453	-3.395	-4.783	.000
	Belanja Modal*LRA	.337	.487	.524	.691	.491

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : SPSS, 2026

Tabel 15. Hasil Uji Robust Standard Error

Coefficients[a,b]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.133	1.565		.085	.933
	Pendapatan Asli Daerah	2.333	.679	1.910	3.438	.001
	Belanja Modal	1.339	1.764	.442	.759	.450
	Laporan Realisasi Anggaran	.906	1.560	.557	.581	.563
	PAD*LRA	-2.653	.665	-2.700	-3.989	.000
	Belanja Modal*LRA	-1.277	1.758	-.531	-.727	.469

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

b. Weighted Least Squares Regression - Weighted by RES2

Sumber : SPSS, 2026

Model asli pada tabel 9 menunjukkan PAD berpengaruh negatif signifikan (B = -0,343, Sig. 0,000), namun setelah winsorization berubah menjadi positif (B = +1,899, Sig. 0,000) dan dikonfirmasi robust SE (B = +2,333, Sig. 0,001). Perubahan arah yang konsisten di kedua metode mengindikasikan pengaruh negatif PAD pada model asli bersifat sensitif terhadap nilai ekstrem. Oleh karena itu, hasil H2 **tidak robust** dan perlu diinterpretasikan dengan kehati-hatian.

Belanja Modal konsisten tidak signifikan di seluruh model, yaitu model asli (Sig. 0,130), winsorized (Sig. 0,681), dan robust SE (Sig. 0,450). Ketidaksignifikan yang stabil di semua spesifikasi menegaskan bahwa penolakan H3 dapat dinyatakan **robust.**

Persamaan 2

Model asli menghasilkan R Square 0,400 (tabel 6) dengan F = 21,808 (Sig. 0,000) (tabel 10).

Tabel 16. Hasil Uji Model Winsorized

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.624[a]	.390	.371	.07193	.390	20.853	3	98	.000

a. Predictors: (Constant), Laporan Realisasi Anggaran, PAD_Wins, Belanja Modal

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : SPSS, 2026

Model Winsorized menghasilkan R Square 0,390 dengan F = 20,853 (Sig. 0,000). Penurunan R Square sebesar 0,010 poin tidak substansial dan nilai F tetap signifikan, sehingga kemampuan prediksi model tidak berubah secara berarti setelah outlier dikendalikan. **H4 tetap terdukung** secara robust.

Persamaan 3

Model asli menghasilkan R Square 0,521 dengan F = 20,091 (Sig. 0,000), di mana PAD×LRA signifikan (B = -2,169, Sig. 0,000) dan BM×LRA tidak signifikan (Sig. 0,491).

Tabel 17. Hasil Uji Model Winsorized

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.715[a]	.511	.486	.06503	.511	20.091	5	96	.000

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal*Laporan Realisasi Anggaran, PAD_Wins, Laporan Realisasi Anggaran, Belanja Modal, PAD_WinsLRA

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : SPSS, 2026

Model Winsorized menghasilkan R Square 0,511 dengan F = 20,091 (Sig. 0,000). Koefisien interaksi PAD_Wins×LRA menghasilkan nilai yang identik yaitu B = -2,169 (Sig. 0,000), sedangkan BM×LRA tetap tidak signifikan (Sig. 0,491). Konsistensi yang sempurna pada kedua variabel interaksi ini menjadikan H5 dan H6 sebagai temuan yang paling robust dalam penelitian ini.

Model Robust SE (WLS) pada tabel 13c menghasilkan PAD×LRA dengan koefisien yang bahkan menguat menjadi B = -2,653 (Sig. 0,000), sementara BM×LRA tetap tidak signifikan (Sig. 0,469). Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa moderasi LRA pada hubungan PAD dan kinerja keuangan merupakan hubungan yang sesungguhnya.

Satu-satunya perubahan yang perlu mendapat perhatian adalah pada variabel PAD. Model asli menunjukkan pengaruh negatif (B = -0,343), namun setelah winsorization berubah menjadi positif (B = +1,899, Sig. 0,000), dan dikonfirmasi oleh robust SE (B = +2,333, Sig. 0,001). Perubahan arah yang konsisten di kedua metode mengindikasikan bahwa pengaruh negatif PAD pada model asli bersifat sensitif terhadap nilai ekstrem. Setelah outlier dikendalikan, hubungan PAD dan kinerja keuangan kembali positif dan lebih konsisten dengan teori sinyal.

PEMBAHASAN

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa selama periode 2022–2024, PAD dan belanja modal secara bersama-sama membentuk dan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Hasil ini konsisten dengan penelitian Widajanto dkk., 2022, yang memverifikasi bahwa PAD, penyeimbangan keuangan, dan belanja modal semuanya berdampak pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Dengan demikian, meskipun banyak faktor lain, seperti kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola, tetap signifikan, komponen fiskal utama suatu daerah secara bersama-sama memengaruhi kemampuan keuangannya.

Temuan paling paradoksal yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan PAD justru memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, bertentangan dengan ekspektasi teoritis yang umumnya berlaku. Kondisi ini dapat dipahami melalui perspektif teori sinyal: ketika PAD meningkat namun tidak disertai penguatan kapasitas kelembagaan dan efisiensi pengelolaan, sinyal yang terkirim kepada pemangku kepentingan justru bersifat negative. (Andjarwati et al., 2021) dalam kajiannya ditemukan bahwa pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan sangat bergantung pada karakteristik fiskal masing-masing daerah, sehingga heterogenitas kontekstual antardaerah menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam menginterpretasikan arah pengaruh tersebut. Meski demikian, hasil uji ketahanan menunjukkan bahwa ketika nilai-nilai ekstrem dalam data dikendalikan, arah pengaruh PAD berbalik menjadi positif mengindikasikan bahwa temuan pengaruh negatif ini bersifat sensitif terhadap kondisi outlier tertentu sehingga perlu diinterpretasikan dengan kehati-hatian.

Berbeda dari PAD, belanja modal secara mandiri tidak terbukti memberikan dampak yang berarti terhadap kinerja keuangan dalam periode penelitian ini, dan ketidaksignifikan ini konsisten muncul di berbagai metode pengujian. (Mubarok et al., 2022) menjelaskan bahwa pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan tidak selalu konsisten dan sangat bergantung pada komposisi serta kualitas belanjanya, di mana alokasi belanja modal yang besar justru dapat menekan rasio efisiensi dalam jangka pendek karena manfaatnya baru bisa terlihat manfaatnya dalam jangka panjang. Penting dicatat bahwa ketika kualitas realisasi anggaran dimasukkan ke dalam model, kontribusi belanja modal mulai terlihat secara positif dan signifikan mengisyaratkan bahwa efektivitas belanja modal sesungguhnya bergantung pada konteks tata kelola anggaran yang melingkupinya.

Ketika Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dimasukkan ke dalam model, kemampuan menjelaskan variasi kinerja keuangan daerah meningkat cukup signifikan, membuktikan bahwa LRA bukan sekadar dokumen pertanggungjawaban formal melainkan variabel yang secara aktif mengklarifikasi kontribusi nyata setiap komponen fiscal. (Situmorang et al., 2025) membuktikan bahwa guncangan eksternal seperti kebijakan refocusing anggaran selama pandemi secara signifikan menurunkan penyerapan anggaran, penerimaan pajak, dan PAD yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menegaskan betapa rentannya kualitas realisasi anggaran terhadap faktor di luar kendali fiskal daerah itu sendiri. Dengan demikian, evaluasi kinerja keuangan daerah yang hanya memandang besaran PAD atau alokasi belanja modal tanpa mempertimbangkan kualitas realisasi anggaran adalah penilaian yang tidak lengkap.

Temuan paling orisinal dari penelitian ini adalah bahwa LRA tidak memperbaiki, melainkan justru memperburuk dampak negatif PAD terhadap kinerja keuangan dan pola ini konsisten di seluruh metode pengujian yang digunakan. Secara substantif, ketika realisasi pendapatan tinggi namun tidak diimbangi efisiensi pengeluaran yang setara, akumulasi pendapatan justru mencerminkan ketidakmampuan daerah dalam mengubah penerimaan fiskal menjadi layanan publik yang efektif. (Arsallya et al., 2021) menemukan bahwa rasio kemandirian yang mencerminkan kemampuan PAD dalam membiayai daerah menjadi variabel paling dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang mengonfirmasi bahwa kualitas pemanfaatan PAD, bukan sekadar besarannya, yang menentukan hasil fiskal secara keseluruhan. Sebaliknya, LRA tidak terbukti

memoderasi hubungan belanja modal dengan kinerja keuangan. (Herianti et al., 2024) menjelaskan hal ini melalui temuannya bahwa faktor penentu efektivitas belanja modal bukan terletak pada tingkat penyerapannya, melainkan pada ketepatan sasaran dan kualitas perencanaan investasi di mana kekuatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran jauh lebih menentukan daripada sekadar besaran realisasi yang dicapai. Secara keseluruhan, penelitian ini mempertegas bahwa reformasi tata kelola keuangan daerah yang bermakna harus menggeser fokus dari obsesi mengejar angka PAD dan realisasi belanja menuju penguatan kapasitas kelembagaan dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi anggaran secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah lebih dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dan realisasi anggaran daripada sekadar besarnya pendapatan dan belanja modal. Peningkatan pendapatan tidak selalu berdampak positif tanpa efisiensi dan tata kelola yang baik, sementara belanja modal bergantung pada ketepatan perencanaan dan pelaksanaan. Realisasi anggaran memperkuat hubungan tersebut, namun juga mengungkap kelemahan dalam pengelolaan anggaran. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sensitivitas data terhadap nilai ekstrem, pendekatan analisis yang belum menangkap dinamika waktu secara penuh, serta belum mencakup faktor kelembagaan secara komprehensif.

SARAN

Saran terbagi menjadi dua :

1. Saran Praktis :
   Pemerintah daerah perlu tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran melalui penganggaran berbasis kinerja, pengawasan yang efektif, dan pemanfaatan sistem digital. Selain itu, belanja modal harus difokuskan pada ketepatan sasaran dan manfaat jangka panjang, serta didukung oleh peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas sumber daya manusia.

2. Saran Teoritis :
   Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode data panel untuk menangkap dinamika antar waktu secara lebih akurat, serta menambahkan variabel yang mencerminkan kualitas tata kelola dan kelembagaan. Selain itu, pendekatan kualitatif seperti studi kasus dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman terhadap hasil yang tidak sepenuhnya terjelaskan secara kuantitatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Universitas atas dukungan akademik yang diberikan, kepada pemerintah daerah provinsi atas publikasi yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, serta kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas ketersediaan data laporan keuangan pemerintah daerah provinsi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan mahasiswa, dosen pembimbing, dan reviewer atas masukan konstruktif yang turut memperkaya analisis dan menyempurnakan naskah ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan teori maupun praktik akuntansi sektor publik di Indonesia.

REFERENSI

Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). Analysis of Local Own Revenue and Balancing Funds on the Financial Performance of Districts and Cities in the Region of East Java Province. *International Journal of Economics and Finance Studies*, *13*(1), 235–250. https://doi.org/10.34109/ijefs.202112233

Andriani, W. (2023). Factors Influencing Local Government Financial Performance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, *4*(3), 951–959. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.3094

Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *9*(10), 1–20. https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3690

Arethusa, T. A., & Terawati, M. T. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2021-2022. *Jurnal Nusa Akuntansi*, *2*(1), 616–632. https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.209

Arsallya, M. R., Azwardi, & Yusnaini. (2021). Analysis of factors affecting capital expenditures and their implications on government financial performance provinces in Indonesia 2011-2019. *International Journal of Research in Business and Social Science*, *10*(5), 95–106. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1195

Atmoko, C. A., & Khairudin. (2022). Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *10*(2), 291–296. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1295

Cahyani, N. L. V. A., Shahirah, N. S., Raja, I. S. L., & Pangestoeti, W. (2025). Tantangan Dan Peluang Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah: Studi Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(7), 10–17. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i7.5597

Dewi, N. A. W. T., Silviani, N. L. P. D., & Anggraeni, N. K. M. (2022). The Effect of Local Revenue, Fiscal Decentralization, and Fiscal Stress on Government Financial Performance. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, *1*(9), 1887–1902. https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i9.1565

Dewi, N. P. R. F., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2022). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, *4*(1), 387–399. Retrieved from https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4582

Firmansyah, A., Arfiansyah, Z., & Huda, A. M. (2024). The Characteristics And Financial Performance Of Local Governments In Indonesia: The Moderating Role Of Financial Health Level. *Accounting Analysis Journal*, *13*(2), 85–94. https://doi.org/10.15294/aaj.v13i2.1894

Fitriani, N., & Syarif, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal,dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat tahun 2016-2023. *ECO-FIN : Economy and Financial*, *7*(1), 334–348. https://doi.org/https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111

Haryati, D. C., Nurpiji, Masitoh, G., Saputra, W., & Subarkah, T. (2025). Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia : Pendekatan Data Panel. *GEMILANG:Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *5*(3), 139–153. https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2185

Herianti, E., Marundha, A., & Haryanto, H. (2024). An accounting review of regional and central budgeting dynamics in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, *8*(8), 1–27. https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.6355

Herzallah, F., Mohammad, B. A., Alhayek, M., & Khan, S. M. F. A. (2025). Mitigating uncertainty in travel agency selection in Jordan: A signaling theory approach. *International Journal of Information Management Data Insights*, *5*(2), 1–15. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2025.100362

Hutauruk, M. F. M. (2024). Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab / Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(3), 42932–42939. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i3.20606

Ishak, J. F. (2022). Local Revenue Toward Capital Expenditure. *Jurnal MONEX*, *1*(11), 30–38. https://ejournal.poltekharber.ac.id/index.php/monex/article/view/2917

Kemenkeu, Djp. (2025). *Press Release APBN Regional Jawa Timur s.d. 31 Desember 2024*. Djpb.Kemenkeu.Go.Id. https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim/id/data-publikasi/press-release/3042-press-release-apbn-regional-jawa-timur-s-d-31-desember-2024.html

Khairudin, Aminah, & Redaputri, A. P. (2020). Pentingnya kinerja keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di indonesia. *Akuntabel*, *17*(1), 148–151. https://doi.org/10.30872/jakt.v17i1.7336

Khoiriyyah, M. Z., & Alliyah, S. (2025). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, *22*(2), 270–285. https://doi.org/10.31851/jmwe.v22i2.19473

Khusnizar. (2024). *Konsekuensi Pemda Jika APBD Defisit*. Jambione.Com. https://www.jambione.com/news/1364963521/konsekuensi-pemda-jika-apbd-defisit

Lekettey, E., Gaffar, V., Juliana, J., & Nugraha, N. (2025). Fiscal Decentralization and Local Financial Autonomy: A Bibliometric Review of Global Research Trends. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, *8*(2), 235–255. https://doi.org/10.33005/jasf.v8i2.598

Lewis, B. D. (2023). Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *59*(1), 1–28. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838

Maher, C. S., Park, S., & McDonald, B. D. (2025). Introduction to the Special Issue: Understanding Local Government Fiscal Condition from an International and Comparative Perspective. *International Journal of Public Administration*, *49*(4), 225–228. https://doi.org/10.1080/01900692.2025.2593229

Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, *1*(1), 25–35. https://doi.org/10.35313/iarj.v1i1.2357

Mubarok, M. H., Nasution, A. A., Kesuma, S. A., & Pangestu, W. (2022). Local government financial performance: the effects of capital expenditure and intergovernmental revenue (The case of South Sumatra Province, Indonesia). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, *9*(6), 503–512. https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364

Mulyadi, R. K., & Kiswara, E. (2025). Emisi Karbon, Nilai Perusahaan, dan Pengungkapan Laporan Keuangan: Tinjauan Teori Legitimasi dan Teori Sinyal (Perusahaan Energi Batubara yang Terdaftar di BEI Tahun 2022-2023). *Diponegoro Journal of Accounting*, *14*(3), 1–15. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Oktavianti, A. N., Mulyani, H. S., Ginanjar, Y., Sulviani, A., & Suhendar, D. (2023). The Effect of Local Own Source Revenue, Tax Effort, and Capital Expenditure on The Level of Regional Financial Independence (Study on District/City Government in West Java Province Period 2019-2021). *Finance and Business Management Journal*, *1*(1), 39–45. https://doi.org/10.31949/fbmj.v1i1.5900

Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *9*(2), 303–318. https://doi.org/https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2985

Permatasari, P., Apriyani, D., Rahman, J. F., Sindi, Edeniah, S., & Putri, S. N. (2025). Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan Pada Provinsi Lampung. *Karimah Tauhid*, *4*(2), 1610–1619. https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.17131

Purnomo, A. (2024). *APBD Jawa Tengah 2025 Alami Defisit 362 Miliar Rupiah*. Erapos.Com. Retrieved from https://www.era-pos.com/daerah/1034985317/apbd-jawa-tengah-2025-alami-defisit-362-miliar-rupiah

Putri, L. M. (2025). *Pemprov DKI terus lakukan penajaman prioritas belanja modal*. Antaranews.Com. Retrieved from https://www.antaranews.com/berita/4904009/pemprov-dki-terus-lakukan-penajaman-prioritas-belanja-modal

Putri, M., & Aswar, K. (2022). Local Government Financial Performance: The Role of Political Monitoring. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, *14*(3), 42–50. Retrieved from https://www.academia.edu/download/95742757/2106.pdf

Putri, N. P. A. S., & Yuniarta, G. A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asil Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Profesi*, *14*(01), 133–147. https://doi.org/10.23887/jap.v14i01.62916

Rahmadani, T., Nurmadi, R., & Arief, M. (2025). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran pada BKAD Kota Medan. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains*, *3*(1), 121–125. https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i2.6305

Safitri, D. C. M., Karina, A., & Digdowiseiso, K. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Management Studies and Entepreneurship Journal*, *4*(6), 8672–8680. https://doi.org/https://doi.org/10.37385/msej.v4i6.3620

Saputra, E., Latif, I. N., & Haryadi, R. M. (2020). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomia*, *9*(2), 271–281. Retrieved from https://www.neliti.com/publications/393202/analisis-kinerja-belanja-dalam-laporan-realisasi-anggaran-pada-dinas-energi-dan

Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, *4*(1), 408–425. Retrieved from https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/134

Sartika, I., Yulsiati, H., & Febriantoko, J. (2025). The Influence of Own-Source Revenue, Transfer Funds, Regional Fiscal Capacity, And Capital Expenditure On Regional Loans. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, *4*(2), 380–388. Retrieved from https://www.journalkeberlanjutan.com/index.php/JoGTA/article/view/1658%0Ahttps://www.journalkeberlanjutan.com/index.php/JoGTA/article/download/1658/1352

Simanjuntak, D. P. (2024). The Influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Local Own-Source Revenue (PAD), and Balance Funds on Capital Expenditure Allocation in All Provincial Governments in Indonesia in 2019-2021. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, *5*(2), 23–32. https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i2.2294

Situmorang, B., Tjaraka, H., & Novita, S. (2025). The impact of public policy on budget realization during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Cogent Economics and Finance*, *13*(1), 1–113. https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2467442

Sukma, I. T., & Hendaris, R. B. (2021). The Role of Audit Opinion in Enhancing the Infuence of Local Revenue and Capital Expenditure on the Financial Performance of Local Governments in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, *32*(3), 1664–1680. https://doi.org/10.31538/iijse.v9i1.9013

Suryani, J. A., & Rachman, S. H. (2026). *Point of View Research Management Analysis of Budget Realization on the Performance of the Regional Government at Enrekang Regency for the Fiscal Year 2021 – 2023 in South Sulawesi Province*. *7*(1), 62–68. Retrieved from https://www.journal.accountingpointofview.id/index.php/POVREMA/article/view/402

Susanti, S., Sam, I., & Yudi. (2025). The Influence of Capital Expenditure, Economic Growth, and Fiscal Stress on Local Government Financial Performance. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, *17*(1), 23–38. https://doi.org/10.22437/jca.v17i1.46767

Utari, D., Carolina, D., Siringgoringgo, G., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Darma, M. (2024). *Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Palembang*. *4*(4), 932–945. https://doi.org/10.32477/jrabi.v4i4.1087

Widajanto, M. B., Dewi, P. P., & Anggraeni, R. F. D. A. (2022). The influence of regional original revenues, balancing funds and capital expenditures on the financial performance of regency/city regional governments of east java province. *Indonesian Accounting Research Journal*, *10*(2), 40–47. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/dd7a/4d45bf16df2b2de1bfb898873caf39dd955b.pdf

Widodo, S. (2022). Financial Performance of City/Municipality Government Before and After Balance Transfer Fund Allocation. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, *7*(1), 38–85.

Winata, K. (2024). *APBD Bali Tahun 2023 Defisit Rp1,9 Triliun*. Balipost.Com. https://www.balipost.com/news/2024/03/25/393313/APBD-Bali-Tahun-2023-Defisit...html

Wiryawan, B. A., & Otchia, C. (2022). The legacy of the reformasi: the role of local government spending on industrial development in a decentralized Indonesia. *Journal of Economic Structures*, *11*(1). https://doi.org/10.1186/s40008-022-00262-y

Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *RISMA :Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *3*(2), 56–69. https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657

Yuliana, Arliansyah, Murhaban, & Zulkifli. (2022). Pengaruh Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, *1*(3), 318–330. https://doi.org/10.29103/jam.v%vi%i.8650

Yuliawati, S., Zuliyana, M., & Rani, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti*, *6*(1), 13–29. https://doi.org/10.52333/jurnalratri.v6i1.747

Zahrah, F. A., Zaen, M. R., & Mellinia, S. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, *2*(1), 369–384. https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2422